

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayatNya, sehingga kami bisa menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan selama ini, khususnya dalam interval waktu satu tahun terakhir (tahun 2021) dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 disusun sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan kegiatan tahun-tahun selanjutnya.

Batam, 10 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BATAM**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) memiliki tiga landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan rencana strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun laporan kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 sesuai program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2021 sehingga laporan kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat urusan pemerintah.

Untuk mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang telah dianggarkan melalui APBD tahun Anggaran 2021 sesuai visi dan misi,

tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengan Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil. Penerapan anggaran berbasis prestasi kerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Tahun 2021 mencakup hal hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada tahun 2021.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### I.4 Struktur Organisasi

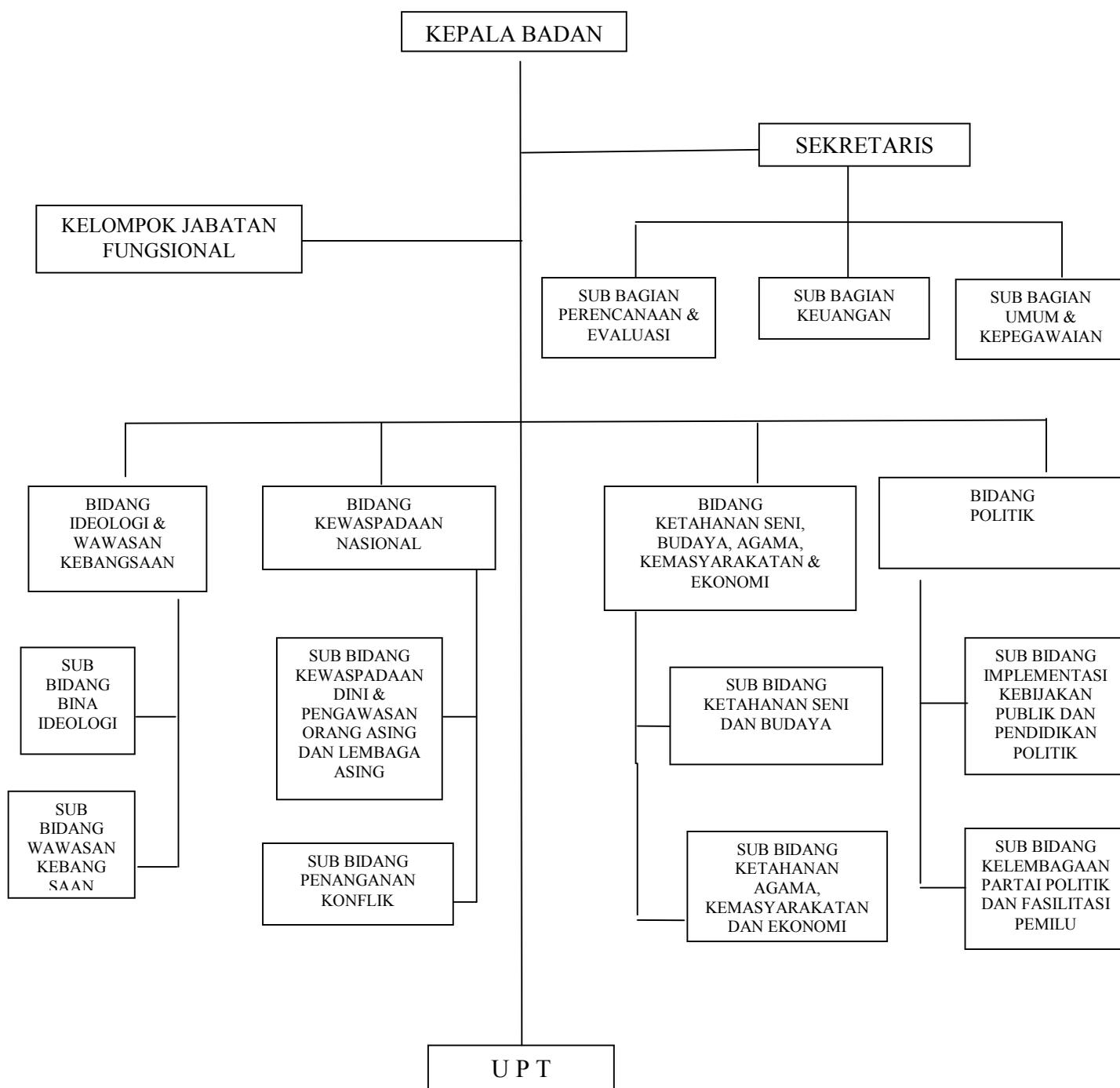
Kedudukan Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) bidang, yaitu; Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik, Bidang Kewaspadaan Nasional, serta Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut :

- **Sekretariat** dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi:
  - a) Sub Bagian Perencanaan Program
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- **Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan** dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
  - a) Sub Bidang Bina Ideologi
  - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- **Bidang Politik** dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
  - a) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
  - b) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
- **Bidang Kewaspadaan Nasional** dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
  - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
  - b) Sub Bidang Penanganan Konflik
- **Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi** dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
  - a) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
  - b) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Adapun Bagan Sturuktur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berdasarkan perda Nomor : 31 Tahun 2014 sebagai berikut :



Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

### 1. Sekretariat

- Mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumahtangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan layanan administrasi dan fungsional.
- Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja
- b. Mengkoordinasi rencana program kerja dan teknis dibidang sekretariat.
- c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang sekretariat
- d. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan teknis badan;
- e. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan, dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- g. Menyusun rencana kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- h. Melaksanakan penetapan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- i. Menyusun laporan keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- j. Menyusun Petunjuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
- k. Melaksanakan analisis dan menyajikan data Badan;
- l. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai badan;
- m. Menerapkan dan mengembangkan system informasi badan;
- n. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;
- o. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
- p. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
- r. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan kerumah tanggan sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- s. Melaksanakan Pelayanan administrasi dan fungsional
- t. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang sekretariat;

- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan badan dan sekretariat; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

- Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang berbasis kinerja;
  - b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. Menyusun penetapan kinerja bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas bina ideologi;
  - e. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas pengembangan wawasan kebangsaan;
  - f. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan bela negara;
  - g. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
  - h. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas pembinaan pembauran;
  - i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kewaspadaan Nasional**

- Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di bidang Kewaspadaan Nasional.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang kewaspadaan nasional yang berbasis kinerja;
  - b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional;
  - c. Menyusun penetapan kinerja di bidang kewaspadaan nasional;
  - d. Melaksanakan tugas kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik;
  - e. Menyusun rencana perumusan kebijakan umum pembinaan kewaspadaan nasional penanganan masalah aktual social, politik, dan organisasi masyarakat;
  - f. Mengendalikan dan melaksanakan norma,standar,pedoman,dan petunjuk operasional di bidang kewaspadaan nasional;
  - g. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi**

- Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi berbasis kinerja;
  - b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi:

- c. Menyusun penetapan kinerja di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
- e. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan akulturasi budaya;
- f. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- g. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- h. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Politik**

- Bidang Politik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di bidang Politik.
- Untuk menyelenggarakan fungsi Bidang Politik mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang politik yang berbasis kinerja;
  - b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang politik;
  - c. Menyusun penetapan kinerja di bidang politik;
  - d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan publik;
  - e. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintah;

- f. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- g. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pendidikan politik;
- h. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilihan umum;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang politik;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang politik; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **I.5 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota Instansi Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### **I.6 Aspek Strategis Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sepenuhnya mendukung Visi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu sebagai alat manajemen Pemerintahan Kota Batam melalui desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### I.7 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi

Adapun permasalahan dan kendala diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
2. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
3. Masih munculnya konflik-konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahanan keagamaan yang salah.
4. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekandensi moral dan budaya di masyarakat.
5. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
6. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
7. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu akibat masih kurangnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis.
8. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding tingkat nasional.

### I.8 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam didukung oleh personil sebanyak 31 (tiga puluh satu) personil, terinci sebagai berikut :

**Tabel I.**  
**Menurut Golongan**

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	10	3	13
2.	Staf Sekretariat	-	2	5	-	7
3.	Staf Bidang	-	3	8	-	11
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>31</b>

**Tabel II**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Menurut Golongan					Jumlah
		SMP	SMU	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-	1	-	11	1	13
2.	Staf Sekretariat	-	3	1	3		7
3.	Staf Bidang	-	1	1	6	3	11
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

### 1.9 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam selama tahun 2021. Capaian Kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Batam. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi, Aspek strategis organisasi, permasalahan utama, sumber daya manusia, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2021.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, realisasi anggaran analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran



ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

#### **BAB IV      PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1 Rencana Strategis**

Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yang menempatkan LKjIP sebagai komitmen bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam beserta seluruh Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar hidup bernegara dan berbangsa, beretika politik yang benar dan dinamis, menumbuh kembangkan hamonisasi hubungan antar umat beragama, antar suku bangsa yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat diberikan pemahaman dan kesadaran untuk bersama-sama dengan Pemerintah, memelihara keamanan dan ketertiban, selalu waspada terhadap ancaman dan gangguan dari dalam maupun dari luar.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Kota Batam dimulai dengan penetapan Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

#### **1) Visi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana dan bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam 2021 ditetapkan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KETAHANAN MASYARAKAT BATAM YANG HETEROGEN MENUJU KEHIDUPAN POLITIK YANG HARMONIS DAN BERBUDI PEKERTI“**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna :

Bahwa dengan modal satu kesatuan bangsa, pembangunan yang dilaksanakan dapat dimaksimalkan dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang harmonis serta mengharmoniskan kehidupan politik.

## **2) Misi**

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati.

Maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah–tengah masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi–fungsi organisasinya.
6. Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

## **3) Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan

merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance indicator*) tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang terdapat dalam Rencana Strategi ( Renstra ) adalah “Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera”.

#### **4) Sasaran**

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral, sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik .
4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegaraMembangun sistem dan budaya politik yang demokatis serta mantapnya hubungan supra dan infrastruktur politik di daerah.
5. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila.
6. Optimalnya penanganan potensi konflik SARA.

**TABEL III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8		-9
<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>		<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10 %</b>	<b>12,50 %</b>	<b>14,30 %</b>	<b>16,70 %</b>	<b>20 %</b>	<b>25 %</b>
	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	95	95	95	95	95	95
	2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	96%	96%	96%	97%
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	85%	-	-
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-	70%	-	-
	4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	96%	96%	96%	97%
	5. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	96%	96%	96%	97%
	6. Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	75%	75%	75%	80%	81%	83%
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	76%	81%

## 5) Strategi

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;

- Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan nusantara kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog interaktif.
- Meningkatkan peran dan fungsi forum kerukunan umat beragama dalam memelihara kerukunan antar suku bangsa dan umat beragama, dalam kehidupan bermasyarakat melalui rapat koordinasi, rakor dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait.
- Diselenggarakannya kegiatan pembinaan dan bimtek bantuan keuangan parpol diharapkan pemahaman bagi pengurus partai politik untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat pada waktunya
- Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan pesisir berupa sosialisasi pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Batam.
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Jejaring Tim Pemantauan Orang Asing (POA) dengan tujuan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi tim pemantauan orang asing dalam memberikan solusi aktual, berkaitan dengan keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Batam dan FKDM Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan peran FKDM Kota Batam dan FKDM Kecamatan dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik-konflik di masyarakat.
- Untuk Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas, tujuan terselenggaranya kegiatan dialog interaktif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan wawasan aparatur pemerintah masyarakat, swasta, organisasi kemasyarakatan terkait aturan dan kebijakan tentang organisasi Kemasyarakatan, Meningkatkan Peran Ormas, LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan

kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas.

## **6) Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Walikota Batam dan kebijakan intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2016–2021 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah–tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya;
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM Partai Politik dan data organisasi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

## **7. Program dan Kegiatan**

Program Kegiatan Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV**  
**TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN T.A. 2021**

NO.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun-2021	
			Target	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>PAGU</b>			<b>14,585,072,175</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6,304,608,131</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	5,681,114,771
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	333,448,000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "yang dilaksanakan"</b>	<b>100%</b>	<b>130,427,500.00</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang: -Ideologi Wawasan Kebangsaan, -Bela Negara, Karakter Bangsa, -Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan - Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang dikordinasikan	134 orang	130,427,500.00
		Jumlah usulan kebijakan penguatan Ideologi yang dihasilkan	1 kebijakan	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1,893,456,544</b>
		<b>Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik</b>	<b>100%</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	1,857,481,544
		Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	75%	35,975,000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>306,945,000.00</b>

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang diusulkan	30 Rekomendasi	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>62,685,000</b>
		Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	-	-
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya, agama dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
		jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar	-	-
6	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>5,886,950,000</b>
		Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	-	-
		Persentase Potensi konflik yang terdeteksi	75%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	5,886,950,000
		Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	15 konflik	
	Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan Deteksi Dini	75%		

## 8. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Dalam rencana kinerja tahunan dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2021 disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang kemudian dikompilasi ke dalam rencana kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2021, dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Fokus utama dalam penetapan rencana kinerja tahun 2021 ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

- **Proses Penyusunan Rencana Kinerja**

Proses penyusunan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1) Penetapan Sasaran Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2021. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

(2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategik (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang telah tapkan. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

(3) Penetapan Target Kinerja;

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Berikut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota :

**TABEL V**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

TUJUAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUPUT) DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET (SATUA N)	Rp
1	2	3	4	5
<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>		<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,1%</b>	<b>14,585,072,175.00</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6,304,608,131</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>5,681,114,771</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	34 orang	5,638,574,771
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	3 Kegiatan	42,540,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>333,448,000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	13,248,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 jenis	95,091,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	34,827,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	26,182,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan yang disediakan	2 jenis	9,600,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	49 kali	154,500,000

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>69,020,000</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	3 Jenis	28,900,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 Jenis	40,120,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>140,609,360</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 jenis	15,616,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	3 orang	124,992,560
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>80,416,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	1 unit	36,776,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	3 unit	15,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	28,640,000
	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "yang dilaksanakan"</b>	<b>100%</b>	<b>130,427,500.00</b>
		<b>Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya</b>	<b>100%</b>	

	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100%	130,427,500.00
		Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang: -Ideologi Wawasan Kebangsaan, -Bela Negara, Karakter Bangsa, -Pembauran, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang dikordinasikan	134 orang	130,427,500.00
		Jumlah usulan kebijakan penguatan Ideologi yang dihasilkan	1 kebijakan	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1,893,456,544</b>
		<b>Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100%</b>	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	100%	1,857,481,544
		Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	100%	
		Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	75%	35,975,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Peserta kegiatan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Uum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	30 orang	1,857,481,544

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik di Daerah yang dilaksanakan.		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	Jumlah peserta/unit yang dimonev kegiatan bidang Politik Dalam Negeri	600 orang	35,975,000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>306,945,000.00</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	30 Rekomendasi	
		Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta kegiatan kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	60 orang	306,945,000.00

	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>62,685,000</b>
		<b>Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif</b>	-	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya, agama dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
		jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar	-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan masyarakat	1 rekomendasi	62,685,000
		Jumlah kelurahan yang difasilitasi pembentukan Satgas Kelurahan Bersinar		
	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>5,886,950,000</b>
		Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	-	
		Persentase Potensi konflik yang terdeteksi	75%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	5,886,950,000
		Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	15 konflik	
		Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini	75%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen,	Jumlah kegiatan bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	8 kegiatan	5,886,950,000

	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah yang di koordinasikan		
		Jumlah Peserta (masyarakat yang mengikuti) Bimtek Kewaspadaan dan Deteksi Dini	60 Orang	

## II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Batam kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang telah disesuaikan sebagaimana penyesuaian Renstra, adalah sebagai berikut:

**TABEL. VI**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila</b>	<b>Persentase Kebijakan Kembangpol yang ditetapkan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100	%
		Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang	100	%

		seharusnya		
<b>II</b>	<b>Meningkat Peran serta Masyarakat dalam Mengimplementasi Kehidupan Berpolitik</b>	<b>Angka Partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres</b>  <b>Angka Partisipasi dalam pemilu Pilkada</b>	-  -	-  -
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100	%
		Persentase Peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%
<b>III</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dalam Kehidupan Berorganisasi, Berbangsa dan Bernegara</b>	<b>Persentase Kebijakan Kesbangpol yang ditetapkan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	1	Kebijakan
<b>IV</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan dan Berideologi Pancasila</b>	<b>Persentase Kebijakan Kesbangpol yang ditetapkan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1	Kebijakan
<b>V</b>	<b>Optimalnya Penanganan Potensi Konflik SARA</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini</b>  <b>Persentase Konflik yang terselesaikan</b>	<b>75</b>  <b>80</b>	<b>%</b>  <b>%</b>
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100	%
		Persentase Potensi konflik yang terdeteksi	75	%
<b>VI</b>	<b>Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesektariaan</b>	<b>95</b>	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 130.427.500,-
2.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.893.456.544,-
3.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 306.945.000,-
4.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 62.685.000,-
5.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 5.886.950.000,-
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.304.608.131,-
<b>PAGU</b>		<b>Rp. 14.585.072.175</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### III.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2021 yang ditetapkan di awal tahun 2021 merupakan pelaksanaan akhir RPJMD 2016-2021. Pada pertengahan tahun 2021 IKU 2021 dilakukan perubahan mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2021-2026. Berikut ini tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, sebagai berikut :

**TABEL VII  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2021	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4
<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10%</b>	RENSTRA
Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	95	SEKRETARIAT

Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	BIDANG POLITIK
	Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	BIDANG POLITIK
Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN, AGAMA, EKONOMI
Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN, AGAMA, EKONOMI
Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	75%	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

### III.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut skala pengukuran nilai peringkat kinerja :

**TABEL VIII**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91 % < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66 % < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 adalah dengan hanya membandingkan target yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 dengan realisasi akhir pencapaian kinerja diakhir tahun 2021. Tanpa membandingkan pengukuran kinerja di tahun 2020. Hal ini disebabkan di tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Sehingga sasaran dan indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program dan Kegiatan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan. Untuk capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL IX**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN / SASARAN</b>	<b>TARGE T 2021</b>	<b>REALIS ASI</b>	<b>CAPAIA N</b>	<b>SUMBER DATA</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>6</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>
	<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10%</b>	<b>11,10%</b>	<b>100%</b>	
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	95	92	96%	SEKRETARIAT

2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	BIDANG POLITIK
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-	
4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, KEMASYARAKATAN, AGAMA, EKONOMI
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	
6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	75%	65%	86%	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	61%	76%	

### III.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen persetujuan kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen persetujuan kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plans*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance results*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang

direncanakan dalam tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah menetapkan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam tahun 2021.

Dari tabel dapat diinformasikan bahwa pada sasaran pertama “optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah” target kinerja sebesar 95, sedangkan realisasi kinerja adalah 92 maka persentase pencapaian realisasi adalah sebesar 96%.

Sasaran kedua yaitu “Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila”, ditargetkan 95%, realisasi pencapaian 95% , sehingga persentase pencapaian sebesar 100%.

Sasaran ketiga yaitu “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik” tidak memiliki target kinerja, disebabkan di tahun 2021 tidak ada dilakukan Pemilu Pileg, Pilpres, pemilu Pilkada.

Pada sasaran “Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara” target kinerja yang ditetapkan sebesar 95% sedang realisasi kinerja sebesar 90%.

Sasaran “Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila”, target kinerja yang ditetapkan 95%, sedangkan realisasi kinerja yang tercapai 100%.

Pada sasaran “Optimalnya penanganan potensi konflik SARA”, dengan idikator target kinerja yaitu “Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini”, target kinerja yang ditetapkan 75%, nanun realisasi kinerja sebesar 65%. Dan indikator program Persentase potensi konflik yang terselesaikan, target kinerja yang ditetapkan 80% sedangkan realisasi kinerja sebesar 61%.

Untuk kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL X**  
**KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
	<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10%</b>	<b>25%</b>	<b>44%</b>
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	92	95	96%
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-
4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%
6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	86%	81%	80%
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	61%	80%	76%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan sangat baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga dilakukan refofusing anggaran. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100 persen. Untuk Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusinya capaian kinerja tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL XI**  
**ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10 %</b>	<b>11,10 %</b>	<b>100%</b>		
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	95	92	96%	Tersedianya anggaran yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan dan Tupoksi	Nihil
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	Koordinasi yang baik dengan Paguyuban, FPK dan tersedianya Anggaran mendukung pelaksanaan kegiatan	Nihil
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	Tidak ada Pelaksanaan Pemilu Pileg dan Pilpres	
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-	Tidak ada Pelaksanaan Pemilu Pilkada	

4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	Koordinasi yang baik dengan Tokoh Ormas, dan tersedianya Anggaran mendukung pelaksanaan kegiatan	Nihil
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	Terciptanya Koordinasi Tokoh Agama, FKUB dan tersedianya Anggaran mendukung pelaksanaan kegiatan	Nihil
6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	75%	65%	86%	Kurang Partisipasi Masyarakat mengikuti rapat koordinasi akibat dampak Covid-19	Memberikan informasi melalui Media Elektronik
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	61%	76%	Bertambahnya jumlah konflik yang belum diselesaikan instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan sangat baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga dilakukan refofusing anggaran. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100 persen.

Pada sasaran Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota pencapaian target kinerja 92,27% sedangkan untuk kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pencapaian kinerja hanya 54.07%, disebabkan realisasi anggaran pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD hanya terserap 20.11%. Hal ini merupakan dampak dari pandemik covid-19 dan adanya aturan pembatasan ke luar daerah.

Pada sasaran optimalnya penanganan potensi konflik SARA, indikator Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini realisasi sebesar 65% dan untuk indikator kinerja persentase potensi konflik yang terselesaikan realisasinya sebesar 61%. Hal ini disebabkan masih banyak unjuk rasa yang belum mendapatkan penyelesaian dari instansi/pihak terkait.

Pada tabel dibawah ini, kami sampaikan kemajuan capaian sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam anggaran 2021 :

**TABEL XII**  
**KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
	<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10%</b>	<b>25%</b>	<b>44%</b>
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	97	95	96%
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	
4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	97%	97%

6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	86%	81%	80%
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	61%	80%	76%

Pada tabel dibawah ini, kami sampaikan Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam anggaran 2021 :

**TABEL XIII**  
**TABEL CAPAIAN KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAI AN	ANGGARAN 2021	REALISASI (Rp.) 2021	% CAPAI AN	TINGKAT EFISIENSI (%)
	<b>Tujuan Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>11,10%</b>	<b>11,10%</b>	<b>100 %</b>	<b>14.585.072 175</b>	<b>14.058.722 .801</b>	<b>96,39%</b>	<b>98</b>
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>97%</b>	<b>6.304.608. 131</b>	<b>5.816.949. 257</b>	<b>92.27%</b>	<b>98</b>
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>130.427. 500</b>	<b>119.950. 000</b>	<b>91.27%</b>	<b>98</b>
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan	-	-	-	<b>1.893.456. 544</b>	<b>1.879.457. 544</b>	<b>99.26%</b>	<b>98</b>

	kehidupan berpolitik							
4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>306.945.000</b>	<b>300.341.000</b>	<b>97.85%</b>	<b>99</b>
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>62.685.000</b>	<b>55.350.000</b>	<b>88.30%</b>	<b>99</b>
6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	<b>75%</b>	<b>65%</b>	<b>86%</b>	<b>5.886.950.000</b>	<b>5.886.675000</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>
		<b>80%</b>	<b>61%</b>	<b>76%</b>	<b>5.886.950.000</b>	<b>5.886.675.000</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>

Tahun 2021

**TABEL XIV**  
**ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik</b>	<b>11,10%</b>	<b>11,10%</b>	<b>100%</b>				
1	<b>Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>96 %</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>MENUNJANG</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.07%		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%		

Tahun 2021

						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	
2	<b>Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila</b>	<b>Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>MENUNJANG</b>
							<b>Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya</b>		
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	<b>100%</b>	

Tahun 2021

							Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100%	MENUNJANG
		Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-		Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	100%	

Tahun 2021

						Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	
							Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	100%	
4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	100%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>MENUNJANG</b>
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	100%	
							Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	95%	
5	<b>Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila</b>	<b>Persentase Kebijakan urusan Kesbangpol yang diterapkan</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan</b>	<b>95%</b>	<b>MENUNJANG</b>

Tahun 2021

							<b>Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif</b>	-	
						Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang Ekonomi, sosial Budaya, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	<b>95%</b>	
							Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar	-	
6	<b>Optimalnya penanganan potensi konflik SARA</b>	<b>Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>	<b>86%</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	<b>65%</b>	<b>MENUNJANG</b>
		<b>Persentase potensi konflik yang terselesaikan</b>	<b>80%</b>	<b>61%</b>	<b>76%</b>		<b>Persentase rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan</b>	-	
							<b>Persentase Potensi konflik yang terdeteksi</b>	86%	
							Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	<b>65%</b>

Tahun 2021

				Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	13 konflik	
				Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan Deteksi Dini	65 %	

### III.4 Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang.

**TABEL XV**  
**CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6,304,608,131</b>	<b>5,816,949,257.00</b>	<b>92.27%</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,681,114,771	5,371,092,965.00	94.54%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,448,000	180,288,209.00	54.07%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69,020,000	69,020,000.00	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,609,360	129,777,283.00	92.30%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,416,000	66,770,800.00	83.03%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>130,427,500</b>	<b>119,950,000.00</b>	<b>91.27%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	130,427,500	119,995,000.00	91.27%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1,893,456,544</b>	<b>1,879,457,544.00</b>	<b>99.26%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1,893,456,544	1,879,457,544.00	99.26%

	Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>306,945,000</b>	<b>300,341,000</b>	<b>97.85%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	306,945,000	300,341,000	97.85%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>62,685,000</b>	<b>55,350,000</b>	<b>88.30%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	62,685,000	55,350,000	88.30%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENIGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>5.886,950,000</b>	<b>5,886,675,000</b>	<b>100%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5,886,950,000	5,886,675,000	100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan sangat baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga dilakukan reconfusing anggaran. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100 persen.

Pada sasaran Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota pencapaian target kinerja 92,27% sedangkan untuk kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pencapaian kinerja hanya 54.07%, disebabkan realisasi anggaran pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD hanya terserap 20.11%.

Hal ini merupakan dampak dari pandemik covid-19 dan adanya aturan pembatasan ke luar daerah.

Analisa Pencapaian Program dan Kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Batam Tahun 2021 sebagai berikut :

**I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp.80.416.000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.770.800,00 dengan persentase anggaran 83.03% dan capaian persentasi realisasi kinerja kegiatan 100 %.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 140.609.360,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.777.283,00 dengan persentase anggaran 92.30% dan capaian persentasi realisasi kinerja kegiatan 100 %.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 69.020.000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.020.000.00 dengan persentase anggaran 100% dan capaian persentasi realisasi kinerja kegiatan 100 %.

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp.5.681.114.771.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.371.092.965.00 dengan persentase anggaran 94.54% dan capaian persentasi realisasi kegiatan 100 %.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 333.448.000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.288.209.00 dengan persentase anggaran 54,07% dan capaian persentasi realisasi kinerja kegiatan 54.07 %.

**II Program penguatan Idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan.**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 130.427.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.950.000,00 dengan persentase anggaran 91.97% dan capaian persentasi realisasi kegiatan 100 %.

**III Program peningkatan peran partai dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilanan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik.  
Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 1.893.456.544 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.879.457.544 dengan persentase anggaran 99.26% dan capaian persentasi realisasi kegiatan 100%.

**IV Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.  
Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp.306.945.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.300.341.000 dengan persentase anggaran 97.85% dan capaian persentasi realisasi kegiatan 100%.

**V. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;**

1. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.  
Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. 62.685.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.350.000 dengan persentase anggaran 88.30% dan capaian persentasi realisasi kegiatan 100%.

**VI. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.  
Telah dianggarkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp.5.886.950.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.886.675.000 dengan persentase anggaran 100% capaian persentasi realisasi kegiatan 100%.

Dana APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam anggaran APBD tahun **2021 yang telah dikelola seluruhnya Pagu Rp.14.585.072.175.- dengan Realisasi Keuangan Rp. 14.058.722.801,-**

### III.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum realisasi pencapaian anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Tingkat efisiensi realisasi anggaran sebesar 99%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target realisasi anggaran program dan kegiatan telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Sesuai skala kriteria penilaian realisasi kinerja anggaran telah mencapai kriteria “Sangat Tinggi”. Sedangkan untuk indikator kinerja pencapaian sasaran, tingkat efektivitas rata-rata mencapai 92% sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah efektif dengan menggunakan sumber anggaran. Sesuai skala kriteria penilaian realisasi kinerja anggaran telah mencapai kriteria “Sangat Tinggi”. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

**TABEL XVI**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA**  
**DAN ANGGARAN TUJUAN SASARAN**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI (Rp.) 2021	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
	<b>Tujuan Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	<b>11,10%</b>	<b>11,10%</b>	<b>100%</b>				
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	95	92	96%	6.304608,13 1.00	5,816,949,25 7.00	92.27 %	98
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila	95%	95%	100%	130,427,500 .00	119,950,000. 00	91.27 %	98
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	-	-	-	1,893,456,5 44.00	1,879,457,54 4.00	99.26 %	98

4	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara	95%	95%	100%	306,945,000.00	300,341,000.00	97.85 %	99
5	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	95%	95%	100%	62,685,000.00	55,350,000.00	88.30 %	99
6	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	75%	65%	86%	5,886,950,000.00	5,886,675,000.00	100%	99
		80%	61%	76%	5,886,950,000.00	5,886,675,000.00	100%	99

### **III.6. Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Publik oleh OPD**

Karakteristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multikultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Sedangkan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

#### **1. Bidang Kewaspadaan Nasional**

Aspek-aspek permasalahan di bidang Kewaspadaan Nasional yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Batam menjadi tidak kondusif. Beberapa permasalahan yang seringkali terjadi antara lain adalah :

- Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan massa turun ke jalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Unjuk rasa elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam;
- Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
- Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (tenaga kerja asing) yang berada di Kota Batam;

- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing);
- Isu - isu terorisme;
- Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

## **2. Bidang Wawasan Kebangsaan**

Dalam bidang Wawasan Kebangsaan terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
- Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekandensi moral dan budaya di masyarakat.

## **3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Dalam bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Tidak tersedianya anggaran untuk survey ke lapangan dalam rangka memvalidasi data ormas se-Kota Batam;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pelaporan/ Pendaftaran Ormas sehingga diperlukan Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Ormas.
- Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang nilai-nilai budaya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Rekap keberadaan LSM/Paguyuban/Ormas se Kota Batam Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	U R A I A N	JUMLAH	K E T
1.	Profesi/Kesenian/Olahraga	7	Terdaftar
2.	LSM	8	Terdaftar
3.	Yayasan	3	Terdaftar
4.	Ormas	2	Terdaftar
5.	Organisasi Kepemudaan	7	Terdaftar
6.	Keagamaan	2	Terdaftar
7.	Paguyuban	9	Terdaftar
	<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	

#### 4. Bidang Politik

Secara umum bidang Politik di Kota Batam masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu;
- Masih belum optimalnya pembinaan terhadap partai politik di daerah dalam pelaksanaan program-program pendidikan politik bagi masyarakat;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi politik dari kalangan perempuan; dan
- Masih minimnya jumlah kader politik perempuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2021 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026

Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarannya. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang **sangat baik**, dilihat dari persentase rata-rata pencapaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 93% dan persentase rata-rata pencapaian realisasi anggaran program/kegiatan dari 10 (Sepuluh) kegiatan dengan sebesar **96.39%** dengan jumlah **Pagu Rp. 14.585.072.175 Realisasi Keuangan Rp. 14.058.722.801,-**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.